

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah kabupaten dan kota dalam pembangunan nasional menjadi fokus penting bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD, serta masyarakat. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahan di wilayahnya sangat menentukan kualitas pembangunan. Kapasitas tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) direncanakan, dikelola, dan dimanfaatkan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memastikan alokasi belanja benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.²

Kebijakan yang dirumuskan secara tepat menjadi fondasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Pemahaman yang akurat mengenai potensi pendapatan dan kebutuhan belanja suatu daerah memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih relevan, baik di tingkat daerah, pusat, maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya.

² Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023 dan 2024 Financial Statistics of Regency/Municipality Government 2023 and 2024 Volume 26, 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, 2024), 3, accessed November 21, 2025, <https://www.bps.go.id>.

Penyusunan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi sangat penting sebagai gambaran komprehensif mengenai kapasitas fiskal daerah. Informasi tersebut berperan sebagai dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Tahun 2023 mencatat total realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mencapai Rp904,74 triliun. Struktur pendapatan tersebut masih sangat bergantung pada pendapatan transfer, yang menyumbang 81,88% atau Rp740,84 triliun dari keseluruhan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sisi lain memberikan kontribusi 17,17% dengan nilai Rp155,38 triliun, sementara kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi 0,95% atau Rp8,52 triliun.³

Komposisi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah masih berada pada fase yang terbatas karena dominasi pendapatan transfer menandai ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini menggambarkan bahwa kapasitas daerah dalam menggali potensi fiskal internal belum optimal, terutama pada komponen PAD yang idealnya menjadi indikator utama kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Proporsi PAD yang masih berada pada kisaran belasan persen memperlihatkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah yang diintensifikasi dan diekstensifikasi perlu diperkuat melalui modernisasi sistem pemungutan,

³ *Ibid.*, 9—12.

penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah menjadi penting karena struktur pendapatan yang lebih seimbang akan mampu mendorong pemerintah daerah bergerak menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan, mengurangi risiko ketergantungan pada transfer pusat, serta memberikan ruang bagi daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.⁴

Tabel 1.1
Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia menurut Jenis Pendapatan (miliar rupiah), 2023

No.	Jenis Pendapatan <i>Type of Revenue</i>	Nilai/ <i>Value</i> (miliar rupiah/ <i>billion</i> <i>rupiahs</i>)	Kontribusi/ <i>Contribution</i> (persen/ <i>percent</i>)
		Realisasi/ <i>Realization</i> 2023	Realisasi/ <i>Realization</i> 2023
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Local Own-Source Revenue</i>	155.376	17,17
a.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	85.174	9,41
b.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8.108	0,90
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Revenue of Management of Restricted Local Assets</i>	7.745	
d.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Legal Local Own-Source Revenue</i>	54.349	6,01

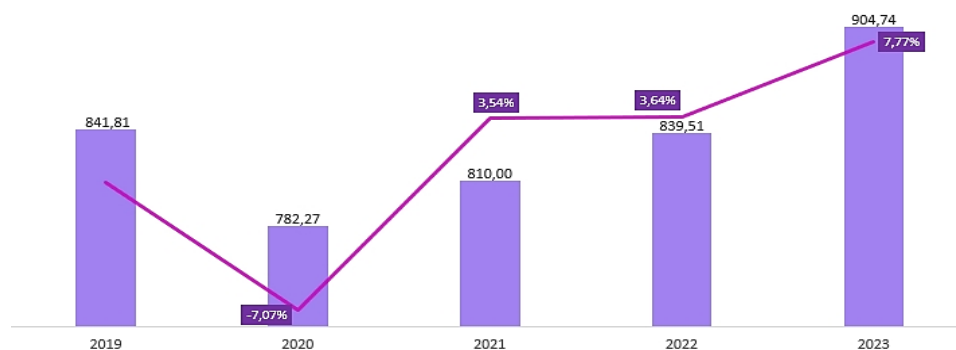
⁴ *Ibid.*, 11.

2. Pendapatan Transfer	740.841	81,88
<i>Transfer Revenue</i>		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	667.586	73,79
<i>Transfer Revenue of Central Government</i>		
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.255	8,10
<i>Transfer Revenue of Inter-Regional</i>		
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.520	0,95
<i>Other Legal Revenue</i>		
Jumlah/Total	904.737	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS-*Statistics* Indonesia (2024)

Realisasi pendapatan pemerintah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2019—2023 menunjukkan pola peningkatan yang berkelanjutan. Tren penurunan hanya terjadi pada 2020, ketika pendapatan daerah berkontraksi -7,07% dibandingkan 2019. Kontraksi tersebut menjadi bukti kuat bahwa pandemi Covid-19 menekan perlambatan aktivitas ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal nasional.⁵

Gambar 1.1
Grafik Pendapatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Selama 2019—2023



Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS-*Statistics* Indonesia (2024)

⁵ *Ibid.*, 25—26.

Pemulihan ekonomi pascapandemi membawa dampak positif terhadap kinerja pendapatan daerah. Stabilitas perekonomian nasional dan perbaikan aktivitas masyarakat mendorong pendapatan pemerintah kabupaten/kota terus meningkat. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023, mencapai 7,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini bahkan telah melampaui level pendapatan sebelum pandemi pada 2019, menandai proses pemulihan fiskal yang semakin kuat.

Perkembangan stabilitas perekonomian nasional mencerminkan upaya pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat desentralisasi fiskal sebagai landasan peningkatan otonomi dan kapasitas keuangan daerah. Dorongan untuk memperkuat kemandirian fiskal terlihat melalui peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan dan memaksimalkan potensi lokal. Capaian ini menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran demi mempercepat pembangunan di tingkat lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁶

Pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan pertanggungjawaban setiap akhir periode anggaran. Laporan dibuat sebagai konsekuensi dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas aktivitas yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan penganggaran sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memantau keadaan keuangan suatu pemerintah daerah serta dapat digunakan sebagai dasar penganalisisan

⁶ *Ibid.*, 27.

kinerja fiskal pemerintah daerah.⁷ Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penganalisisan untuk meninjau suatu tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas otonomi kewenangan yang dinilai melalui laporan pertanggungjawaban. Penganalisisan kinerja atas keuangan pemerintah daerah mampu diperuntukkan dalam perbaikan eksekusi kerja nyata dari entitas publik.⁸ Kinerja keuangan tersebut diukur dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Pengalisan laporan keuangan merupakan aktivitas interpretasi numerik pada akun di laporan keuangan sebagai ajang mencapai nilai standar kinerja keuangan, hasil dari analisis dipergunakan sebagai titik dasar *decision making* (pengambilan keputusan) ekonomi, sosial, atau politik secara matematis. Ada berbagai teknik yang dapat dipergunakan dalam konsep analisis pada laporan keuangan.

Salah satu teknik yang bisa dipakai adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan daerah merupakan proses perbandingan secara matematis antara dua akun atau lebih dimana data itu diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk merepresentasikan perjalanan kinerja dari tahun ke tahun.⁹ Adapun penganalisisan rasio keuangan daerah dapat meliputi pertumbuhan

⁷ Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, n.d., 5—11, accessed November 1, 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

⁸ Rahayu, *Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama) Jakarta, 2020), 6—7, accessed November 1, 2025, [2bKqZaoi3rfi6bzO9chDWKDuPBdsxJIu9M1ii3Y.pdf](https://doi.org/10.24127/2bKqZaoi3rfi6bzO9chDWKDuPBdsxJIu9M1ii3Y.pdf).

⁹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Keempat (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 137—141.

pendapatan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), derajat desentralisasi, dan kemandirian keuangan daerah.

Rasio pertumbuhan pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan periode terkini dikurangi pendapatan periode sebelumnya kemudian dibagi dengan total keseluruhan pendapatan periode sebelumnya. Rasio ini menganalisis besaran kemampuan pemerintah daerah dalam pertahanan dan peningkatan kesuksesan capaian yang telah diraih dari satu periode ke periode yang lain. Pertumbuhan yang positif mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan negatif dapat mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi, lemahnya sistem pemungutan pajak dan retribusi, atau kurang optimalnya kebijakan fiskal daerah.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi.

Rasio efisiensi pendapatan daerah dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan atau realisasi belanja daerah dengan realisasi

pendapatan daerah. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan permungutan pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi dalam proses administrasi, penagihan, dan pengawasan penerimaan pendapatan daerah. Nilai rasio yang rendah menunjukkan pengelolaan sumber daya yang hemat dan produktif, sedangkan rasio yang tinggi mengindikasikan pemborosan biaya atau kelemahan dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan desentralisasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin baik kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya dengan sumber daya sendiri. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi umumnya memiliki tata kelola keuangan yang kuat, ekonomi daerah yang produktif, dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, 140.

Hasil penelitian Rahmasari dan Wuryani menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto jika dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil kemandirian yang rendah, desentralisasi yang belum efisien dalam pelaksanaan, dan tergolong defisit dalam pengelolaan belanja.¹¹ Penelitian Putri dan Munandar menemukan hasil sebaliknya bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang jika dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang sangat efektif dan sangat efisien.¹² Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Pangastuti, artinya kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu apabila dinilai menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik.¹³

Penyerapan pendapatan pemerintah daerah tingkat kota di Provinsi Jawa Timur periode 2023 menunjukkan bahwa Kota Blitar berada pada posisi terendah nomor 3 setelah Kota Surabaya nomor 1 dan Kota Malang nomor 2. Kondisi tersebut mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal Kota Blitar dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Situasi

¹¹ Avinda Goldea Rahmasari dan Eni Wuryani, “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi pada Kota Mojokerto),” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 9, no. 3 (2021): 77—86, accessed November 21, 2025, <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>.

¹² Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020,” *jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 2296—2313, accessed November 21, 2025, <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1684>.

¹³ Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti, “Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19,” *Among Makarti* 15, no. 1 (2022): 90—104, accessed November 21, 2025, <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>.

ini menandakan adanya ruang peningkatan dalam efektivitas penggalian pendapatan asli daerah serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.¹⁴

Tabel 1.2
Tingkat Penyerapan Pendapatan Terendah Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Timur (persen) Periode 2023

Kota <i>Municipality</i>	Tingkat Penyerapan Pendapatan Terendah <i>Lowest Revenue Absorption Rate</i>
1. Kota Surabaya	90,57
2. Kota Malang	91,53
3. Kota Blitar	102,34
4. Kota Pasuruan	103,35
5. Kota Batu	103,92
6. Kota Madiun	104,35
7. Kota Mojokerto	105,19
8. Kota Kediri	107,19
9. Kota Probolinggo	108,99

Sumber: Badan Pusat Statistik/BPS-*Statistics* Indonesia (2024)

Penempatan Kota Blitar pada posisi terendah nomor 3 tingkat kota di Provinsi Jawa Timur periode 2023 mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan daerah masih memerlukan strategi penguatan yang lebih terarah dan adaptif. Pencapaian pendapatan yang relatif rendah mencerminkan kelemahan dalam manajemen pendapatan maupun kontribusi sektor-sektor produktif yang sedikit.

Penyerapan pendapatan rendah dipicu oleh faktor eksekusi program kerja belum ada kesiapan dan menemui kendala, proses lelang pengadaan barang dan jasa baru berjalan di triwulan III atau IV, kehati-hatian dalam pencairan anggaran terkait tuduhan korupsi, dan penyerapan justru

¹⁴ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, *Laporan Pendahuluan Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kota Blitar Tahun 2024* (Blitar: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, 2024), 81, accessed November 21, 2025, <https://blitarkota.bps.go.id>.

didominasi oleh belanja rutin untuk gaji pegawai sementara untuk kebutuhan infrastruktur tertunda. Optimalisasi potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.¹⁵ Fenomena menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme kemandirian fiskal.

Kota Blitar mencatat penghargaan sebagai daerah dengan serapan belanja tertinggi periode 2024 dalam ajang APBD *Award* 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, meski sempat mengalami penyerapan pendapatan terendah nomor tiga tingkat kota Jawa Timur di periode 2023.

Kemampuan pemerintah daerah Kota Blitar dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirasa optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga berdampak langsung atas peningkatan di periode 2024 pada kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan daerah. Keberhasilan tidak terlepas dari perencanaan anggaran yang sistematis, pengendalian pelaksanaan yang terukur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan.¹⁶ Serapan belanja daerah yang tinggi menunjukkan terdapat efisiensi dalam siklus anggaran sekaligus mengindikasikan potensi

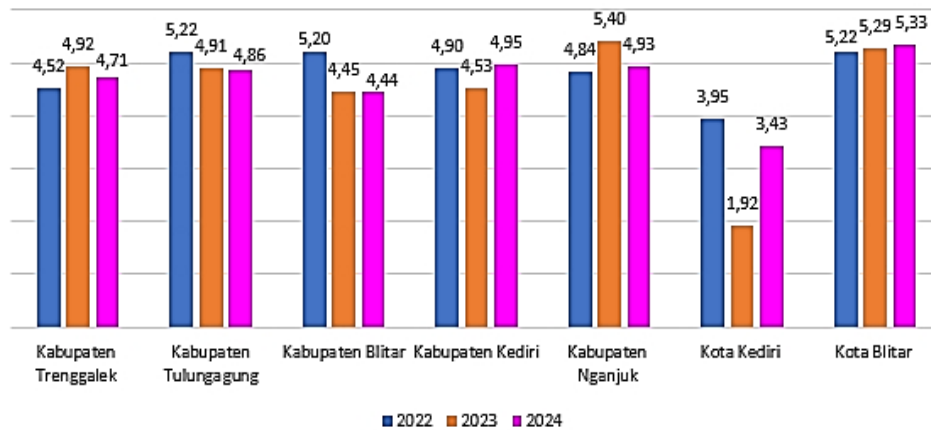
¹⁵ Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata, *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2023 dan 2024 Financial Statistics of Regency/Municipality Government 2023 and 2024 Volume* 26, 2024, 81.

¹⁶ Admin Kota, "Kota Blitar Raih Penghargaan Serapan Belanja Daerah Tertinggi Tahun 2024," Pemerintah Kota Blitar, 2024, 1, accessed April 24, 2026, <https://blitarkota.go.id/>.

anggaran menganggur (*idle budget*) lebih rendah, yang menjadi permasalahan klasik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Gambar 1.2

Grafik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri Periode 2022—2024



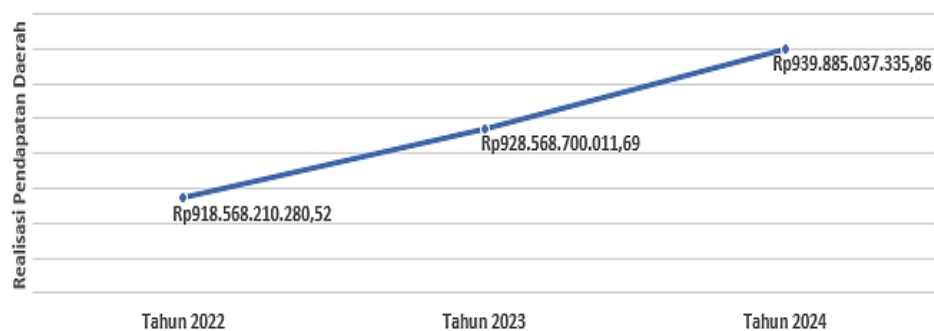
Sumber: Diolah peneliti, 2026

Kota Blitar unggul menjadi nomor satu pertumbuhan perekonomian tertinggi dan yang stabil naik berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di periode 2024 tingkat kabupaten/kota di Eks- Karesidenan Kediri, yaitu 5,33. Periode 2022 bersama Kabupaten Tulungagung meraih posisi pertama dengan nilai yang sama 5,22. Periode 2023 Kota Blitar mengalami pergeseran posisi menjadi peringkat kedua, tetap terbaik dengan capaian 5,29 berada di bawah Kabupaten Nganjuk yang menempati posisi pertama sebesar 5,40 dalam pertumbuhan ekonomi. Secara komparatif hanya tiga daerah yang menunjukkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke 2023, yaitu Kabupaten Nganjuk (4,84 menjadi 5,40), Kota Blitar (5,22 menjadi 5,29), dan Kabupaten Trenggalek (4,52 menjadi 4,92), sementara empat daerah lain, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri,

Kabupaten Blitar, dan Kota Kediri mengalami penurunan akibat perlambatan aktivitas ekonomi.

Data PDRB ini memberi indikasi bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi tidak berlangsung secara merata, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait faktor struktural, sektoral, dan kebijakan fiskal daerah yang memengaruhi disparitas kinerja pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota wilayah Eks-Karesidenan Kediri.¹⁷

Gambar 1.3
Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Periode 2022—2024



Sumber: Diolah peneliti, 2025 (Lampiran 1)

Data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar yang diolah peneliti menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Kota Blitar selama periode 2022 sampai dengan 2024 berada dalam kondisi yang meningkat.¹⁸ Pendapatan daerah merupakan komponen fundamental dalam struktur keuangan pemerintah daerah karena berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta

¹⁷ BPS Kota Blitar BPS-Statistics Blitar Municipality, *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2023 Ekonomi Kota Blitar Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,29 persen* (Blitar: BPS Kota Blitar/BPS-Statistics Blitar Municipality, 2024), 6, accessed April 24, 2026, <https://web-api.bps.go.id/>.

¹⁸ *Ibid.*, 130.

pelayanan publik. Angka realisasi pendapatan mencapai Rp918.568.210.280,52 pada periode 2022 kemudian meningkat menjadi Rp928.568.700.011,69 pada periode 2023 lalu meningkat lagi menjadi Rp939.885.037.335,86 pada periode 2024, sehingga menggambarkan adanya peningkatan kapasitas fiskal yang perlu digali lebih lanjut.

Rekam jejak Kota Blitar dalam pengelolaan keuangan menunjukkan konsistensi dan kualitas tata kelola fiskal dalam jangka panjang. Prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebanyak lima belas (15) kali berturut-turut hingga Tahun Anggaran 2024 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan secara wajar, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Wali Kota Blitar pada 2 Mei 2024, sehingga memperkuat legitimasi capaian tersebut secara institusional. Konsistensi perolehan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan adanya komitmen kuat terhadap akuntabilitas publik, integritas fiskal, dan kepatuhan pada regulasi.¹⁹

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) menempatkan Kota Blitar sebagai peringkat pertama kategori kota kecil secara nasional serta tertinggi di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagaimana dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peningkatan nilai dari 81,80 pada tahun 2022 ke

¹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Subbagian Hubungan Masyarakat, "Cermin Konsistensi Tata Kelola Keuangan: Pemkot Blitar Ukir Rekor 15 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP," *Harian Pagi Surya*, 5 Mei 2025, 10, accessed November 22, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/>.

2023 menjadi sebesar 82,48 menunjukkan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan yang ditopang oleh sistem pengendalian internal, transparansi, serta akuntabilitas birokrasi yang semakin baik, selaras dengan agenda reformasi birokrasi yang diinisiasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks integritas yang tinggi berkorelasi positif dengan penurunan risiko korupsi dan peningkatan kepercayaan publik, berimplikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.²⁰ Data penghargaan di atas menjadikan Kota Blitar sebagai objek penelitian yang relevan dan strategis untuk mengkaji kinerja keuangan daerah, terkhusus dalam menilai integritas birokrasi mampu mendorong efisiensi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kualitas belanja publik.

Kota Blitar memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai wilayah yang kaya akan nilai sejarah nasional. Salah satu kawasan penting Makam Bung Karno yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, sekitar satu kilometer dari Pusat Informasi dan Perdagangan (PIPP) serta tiga kilometer dari Stasiun Kereta Api Kota Blitar, menjadikan kota ini memiliki arus kunjungan masyarakat yang cukup tinggi sepanjang tahun. Kompleks pemakaman tersebut merupakan tempat disemayamkannya Proklamator Kemerdekaan Indonesia

²⁰ Admin Kota, "Hasil SPI KPK Kota Blitar Raih Skor Tertinggi Se-Jawa Timur dan Pertama Nasional Kategori Kota Kecil," Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2024, 1, accessed April 24, 2026, <https://blitarkota.go.id/>.

dan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap dinamika sosial ekonomi daerah.²¹

Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah dengan tujuan memastikan kebenaran kelola tiga komponen tersebut sudah terlaksana, dicek, *beroutput* secara akuntabilitas dan transparansi.²²

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Blitar karena Pemerintah Kota Blitar merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah terselenggara kewenangan (otonomi) daerah, memiliki tanggung jawab dari pusat dalam pengelolaan fiskal sendiri serta guna pengecekan Pemerintah Kota Blitar sudah melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik, benar, bijak, dan bertanggungjawab. Alasan lain peneliti melakukan penelitian tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar karena penelitian ini masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya.

Prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima belas (15) kali berturut-turut dari BPK RI, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di periode 2024, 2022, dan 2023 tingkat Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Kediri, peraih serapan belanja tertinggi di periode 2024, dan tercatat indeks Survei Penilaian Integritas

²¹ Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar, *Profil Kota Blitar 2024* (Blitar: Pemerintah Kota Blitar, 2024), 13, accessed October 21, 2025, <https://blitarkota.go.id>.

²² Walikota Blitar Provinsi Jawa Timur, "Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah," Pub. L. No. 28, 6 (2022), accessed December 15, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

(SPI) tertinggi kategori kota kecil tingkat nasional memperkuat relevansi Kota Blitar sebagai objek penelitian kinerja keuangan, karena terdapat cerminan komitmen kuat terhadap akuntabilitas publik. Keberadaan destinasi bersejarah Makam Bung Karno berpotensi menjadi sumber pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Laporan Keuangan Daerah dalam Rangka Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Blitar Periode 2022—2024 (Studi pada Kantor Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk utama pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, terlihat dari dominannya porsi pendapatan yang berasal dari transfer dibandingkan sumber lainnya.

3. Pemerintah daerah menunjukkan kapasitas yang masih terbatas dalam menggali potensi PAD, tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio efisiensi pendapatan daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio derajat desentralisasi?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan.

2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio efisiensi pendapatan daerah.
4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio derajat desentralisasi.
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar periode 2022—2024 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan intelektual khususnya dalam Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Blitar sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, serta sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Blitar.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi keilmuan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi peneliti yang minat dibidang serupa untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup selalu dibutuhkan dalam penelitian agar penelitian dapat fokus pada yang diteliti saja, sehingga pembahasannya tidak keluar dari topik penelitian. Penelitian ini akan terfokuskan pada kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikatnya dengan lima variabel bebas yang digunakan untuk menilainya. Variabel bebasnya yakni rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi pendapatan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan data yang diolah dalam penelitian, karena hanya mampu menggunakan data sekunder yang diambil dari situs resmi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
2. Keterbatasan waktu penelitian, karena hanya menggunakan tiga tahun dalam kegiatan analisis, yaitu pada periode 2022 sampai dengan 2024.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran dalam memahami istilah yang ada dalam judul penelitian. Penegasan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada khalayak umum, pembangunan daerah yang tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat, dan memiliki keleluasaan di area penggunaan dana-dana untuk kepentingan beserta kesejahteraan masyarakat daerah dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan adalah perhitungan pendapatan tahun sekarang dikurangi *revenue* (pendapatan) periode sebelumnya kemudian diperbandingkan dengan total *overall revenue* (pendapatan keseluruhan) periode sebelumnya. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam

²³ Muhammad Idris Patarai, *Kinerja Keuangan Daerah*, Cetakan II (Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel No.007/SSL/03), n.d.), 261, accessed December 7, 2025, <http://eprints.ipdn.ac.id/>.

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.²⁴

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

d. Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

Rasio efisiensi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan, yakni realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

e. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah.

f. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan antara jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah

²⁴ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 2019, 137—141.

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.²⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel atau istilah yang digunakan dalam lingkup objek penelitian agar memudahkan pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel.²⁶ Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh rasio pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dibuat untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika kepenulisan skripsi ini menjelaskan urutan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian, terdiri dari enam bagian dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, 140.

²⁶ Benny S. Pasaribu et al., *Metodologi Penelitian*, (ed.) oleh Ahmad Muhaimin, UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN, Cetakan I (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), 67, accessed October 27, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/>.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjadikan pendahuluan dari seluruh penulisan, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, penegasan variabel, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan tentang deskripsi teori mengenai akuntansi pemerintah, analisis laporan keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah. Beserta pembahasan terkait hasil revidi penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data dan variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, sajian data, dan hasil penilaian dari konteks penelitian yang dilaksanakan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan dijelaskan terkait hasil dari analisis yang telah dilakukan dan hubungan antara penelitian dengan teori maupun studi empiris yang dilaksanakan oleh peneliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang membahas mengenai hasil-hasil penelitian secara utuh dan menyeluruh dalam bentuk kesimpulan serta berisi saran lanjutan untuk kedepannya.